

## IDEOLOGI MARHAENISME MASA PEMERINTAHAN SOEKARNO TAHUN 1950-1965<sup>1</sup>

Oleh:

Padma Cahyaningtyas<sup>2</sup>, Djono<sup>3</sup>, Tri Yuniyanto<sup>4</sup>

### *Abstract*

*The purpose of this research is to describe: (1) Soekarno's ideology about marhaenism. (2) the implementation of the Marhaenism ideology during the Soekarno government in 1950-1965. The method used in this research is historical. The steps taken in the historical method are heuristics, criticism, interpretation and historiography. The data sources used are primary and secondary sources. Data collection techniques using literature study techniques. Data analysis techniques by doing external and internal criticism. Based on the results of the research, it can be concluded: (1) The ideology of Marhaenism is a thought designed by Soekarno before Indonesian Independence. Soekarno got the term marhaen from a poor farmer he met while visiting Bandung. This ideology refers to the thought of Marxism as one of the drivers of the proletarian society that developed in Europe. Marhaen's ideology fights for the interests of the small people of Indonesia, most of whom work as farmers and laborers. In addition, Soekarno's thought had a concept of principle and struggle to save the lives of the oppressed marhaen. The aim of marhaenism is to eliminate Dutch imperialism and colonialism. (2) The implementation of the ideology of marhaenism during the Old Order government drew various responses in the community. There are several political parties based on the ideology of marhaenism. Political parties based on marhaenism include the Indonesian National Party (PNI), the Indonesian Marhaen People's Union (Permai), the Indonesian Women's Movement (Gerwani). PNI can be seen from the policies used that emphasize the lives of the little people. Permai in implementing the ideology of marhaenism is the same as PNI, but the PNI masses are more because Permai reaches out to the people in the village. Gerwani supports the struggle of BTI (Barisan Tani Indonesia) against the government which is trying to evict the farmers from the land they occupy.*

**Keywords:** *Ideology, Merhaenism, Soekarno, Old Order*

## PENDAHULUAN

---

<sup>1</sup> Bagian Penelitian Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Program Studi Pendidikan FKIP Sejarah Universitas Sebelas Maret.

<sup>3</sup> Staff Pengajar pada Program Studi Pendidikan FKIP Sejarah Universitas Sebelas Maret.

<sup>4</sup> Staff Pengajar pada Program Studi Pendidikan FKIP Sejarah Universitas Sebelas Maret.

Soekarno merupakan presiden pertama Indonesia. Perjuangannya sudah dimulai semenjak Soekarno masih remaja. Di masa mudanya Soekarno sekolah dan tinggal bersama Cokroaminoto di Surabaya. Cokroaminoto merupakan ketua Sarekat Islam kala itu sehingga Soekarno sering bertemu dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti, Semaun, Abdul Muis, Agus Salim, dll. Tokoh-tokoh pergerakan tersebut berkumpul untuk melakukan pembicaraan mengenai perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Suasana seperti itu serta didukung dengan perkembangan intelektualitas Soekarno, membuahkan satu niat dalam dirinya untuk mendalami dunia pemikiran. Soekarno mulai mempelajari buku-buku dari Garibaldi, Lincoln, Adler, Marx, Voltaire, Engels, George Washington, Thomas Jefferson, Otto Bauer dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya. Soekarno mulai memahami isi dari buku-buku tersebut kemudian dijadikan sebagai pedoman dasar oleh Soekarno (Salam, 1987: 52-53).

Soekarno mencetuskan pemikirannya tentang marhaenisme, yang merupakan sintesis dari pemikiran Karl Marx, marxisme. Soekarno adalah orang yang sangat memperhatikan rakyat miskin. Seluruh analisis pribumi tentang kemelaratan dan kemiskinan masyarakat menjadi perhatian Soekarno. Sikap Soekarno tersebut mendorongnya untuk terus berjuang dan membela nasib rakyat miskin. Saat Soekarno berusia 20 tahun, Ia melahirkan suatu konsep marhaenisme. Marhaenisme adalah asas yang dipakai PNI. Dengan demikian, PNI yang dipelopori serta didirikan oleh Soekarno tidak terpisah dari marhaenisme (Sjamsudin, 1988: 153).

Pemikiran intelektual Soekarno tentang Marhaenisme mengadaptasikan sosialisme sesuai dengan karakteristik sosial rakyat Indonesia. Marhaenisme menjadi perjuangan politik nasionalisme kelas di Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial dan perikemanusiaan yang beradab pasca Indonesia merdeka. Sastroamidjojo (1961: 55) mengatakan bahwa marhaenisme sebagai sosialisme Indonesia. Ideologi ini berkembang bersamaan dengan ideologi sosialisme dan komunisme sebagai ujung tombak penghancuran segala manifestasi dari kolonialisme dan imperialisme Eropa yang ada di Indonesia sejak 300 tahun lamanya (Syafira & Ibrahimsyah, 2016: 2).

Rocamora (1991: 149) memberikan analisis politiknya mengenai keberadaan marhaenisme di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Rocamora menyatakan ideologi yang dikonsepsikan Soekarno tentang nasionalisme ekonomi membebaskan *wong cilik* dari belenggu kapitalisme barat dan feodalisme lokal.

## KAJIAN TEORI

Penelitian ini menggunakan beberapa kajian pustaka untuk menguraikan dan menghubungkan variable dalam penelitan, antara lain: Ideologi, Sosialisme dan Kepemimpinan.

### **1. Ideologi**

Ideologi dalam bahasa Yunani berasal dari kata “*idea*” dan “*logos*”. Arti *idea* adalah gagasan, pemikiran, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Sementara *logos* memiliki arti ilmu. Istilah ideologi untuk pertama kali diungkapkan oleh Antonie Destutt de Tracy yang hidup di 1754-1836. De Tracy melontarkan pemikirannya saat revolusi Perancis untuk mendefinisikan sains tentang ide. Pengertian mengenai “*idea*” memiliki arti yang sama dengan cita-cita dan atau gagasan. Cita-cita yang dimaksud oleh De Tracy ialah cita-cita yang bersifat tetap dan cenderung mendorong orang untuk dapat mencapai tujuannya. Cita-cita yang dicanankan itu sekaligus merupakan dasar, pegangan, paham atau pandangan dari seseorang untuk melakukan perbuatan. Suatu negara memiliki cita-cita yang ingin dicapai atau tujuan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu Negara tersebut dapat dikatakan memiliki ideologi.

Osman (2010: 23) memaknai ideologi berintikan serangkaian norma atau nilai atau sistem nilai dasar yang memiliki sifat mendalam dan menyeluruh. Ideologi dimiliki dan dijadikan pedoman oleh bangsa atau suatu masyarakat atau negara sebagai wawasan atau pandangan hidup. Sistem nilai dasar ideologi memungkinkan untuk mengetahui yang cara paling tepat dalam bersikap dan bertindak untuk mempertahankan serta membangun kehidupan duniawi bersama dengan berbagai macam dimensinya (Afandi, 2012: 82).

### **2. Sosialisme**

Pada hakikatnya, sosialisme berasal dari suatu kepercayaan dari persoalan manusia. Persoalan-persoalan manusia ini memunculkan kepercayaan bahwa semua kemelaratan dan penderitaan yang ditemui manusia dapat diusahakan untuk dilenyapkan. Kemelaratan dan penderitaan yang diakibatkan oleh pembajakan di bidang politik dan ekonomi. Para pengusaha dengan sifat-sifat liberalis dan kapitalisnya, mempunyai kekuatan penuh untuk mengontrol

kaum di bawahnya. Segala keserakahan para penguasa yang berpegang teguh pada individualisme dan rasionalisme mendorong sebagian orang mencari cara yang berbeda guna memecahkan persoalan sosial tanpa melakukan tindak kekerasan (Noer, 1999: 188).

Sosialisme ialah suatu pandangan yang menjadikan kepentingan kelompok atau kepentingan kebersamaan (kolektifisme) sebagai fokus dari pemikiran dan inti dari pergerakannya.

### **3. Kepemimpinan**

Teori kepemimpinan merupakan generalisir dari satu seri perbuatan kepemimpinan dan pandangan-pandangan mengenai kepemimpinannya. Dengan menitik beratkan pada etika profesi kepemimpinan latar belakang sejarahnya, sifat-sifat utama pemimpin, sebab-musabab timbulnya kepemimpinan, persyaratan menjadi pemimpin, serta tugas pokok dan fungsinya dapat mengambil kesimpulan mengenai teori kepemimpinan (Kartono, 2011: 31).

Kepemimpinan berpatokan pada fungsi dan peran untuk memberikan pengaruhnya. Sedangkan otoritas kepemimpinan menyangkut pada hak dan dasar yang legal serta mengisyaratkan adanya pengakuan dari pihak yang terpengaruh oleh pelaksanaan otoritas pemimpin itu. Pengaruhnya baik dari kualitas istimewa individu pemimpin maupun legalitas dalam kerangka tradisi (Soekanto, 1949: 192-200).

Burns mengemukakan, kepemimpinan merupakan suatu proses, tidak hanya sebuah perbuatan yang memiliki ciri-ciri yang berdiri sendiri. Kepemimpinan sebagai suatu gelombang antara hubungan yang berkembang di masyarakat secara terus menerus membangkitkan tanggapan-tanggapan di kalangan penduduk. Motivasi dari para pengikut-pengikut ialah dengan memodifikasi perilaku mereka pada saat dihadapkan pada suatu tanggapan atau perlawanan yang kontra dalam sebuah proses arus balik yang tidak akan berhenti (Nashori, 2009: 61).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilaksanakan di Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNS, Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta, Monumen Pers Nasional Surakarta, dan Arsip Nasional Indonesia (Anri). Metode yang digunakan adalah metode historis. Notosusanto (1978: 11) menjelaskan bahwa metode penelitian historis adalah kumpulan prinsip atau aturan sistematis untuk memberikan bantuan secara efektif di dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi penelitian sejarah. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder dalam bentuk tertulis. Sumber primer tertulis dalam penelitian ini arsip pidato dari Soekarno tahun 1850-1965. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data historis. Teknik analisis data historis menurut Kartodirdjo (1982: 16) adalah teknik analisis yang menggunakan ketajaman dalam melakukan interpretasi terhadap data sejarah yang didapatkan. Prosedur penelitian dalam metode historis dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: pengumpulan sumber (Heuristik), verifikasi sumber (Kritik intern dan ekstern), penafsiran fakta-fakta sejarah (Interpretasi), dan Penulisan sejarah (Historiografi).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Ideologi Marhaenisme Soekarno**

Masyarakat Hindia Belanda sebagai daerah jajahan mengalami kesengsaraan akibat adanya *culturstelsel* (sistem tanam paksa) yang berlangsung sejak tahun 1830. Ratu Wihelmina memberikan dan menerapkan Politik Etis atau politik balas budi pada tahun 1901 dengan alasan meningkatkan kesejahteraan penduduk Hindia Belanda melalui campur tangan langsung dalam kehidupan ekonomi. Politik Etis memiliki 3 kebijakan yaitu irigasi, pendidikan, dan emigrasi. Padahal kebijakan ini dilatarbelakangi oleh keinginan Belanda untuk melakukan liberalisasi ekonomi di Hindia Belanda (Dick.H, 2002: 117). Salah satu isi dari Politik Etis yaitu edukasi. Banyak kaum muda priyayi yang dapat mengenyam pendidikan, sehingga muncul kaum terpelajar atau cendekiawan. Kalangan atas pribumi yang terdidik terketur hatinya melihat penderitaan rakyat kecil yang mengalami penindasan

akibat prakter kolonialisme dan imperialisme Belanda membentuk organisasi-organisasi sosial-politik dan budaya

Soekarno mengawali pergerakan politiknya yang memperjuangkan kebebasan Indonesia di kota Bandung. Ide persatuan Soekarno lahir dalam bentuk tulisan yang berjudul “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme” pada tahun 1926. Ide tersebut muncul ketika Soekarno masih berada di Surabaya. Lalu munculnya karya-karya politik Soekarno seperti *Indonesia Menggugat* pada tahun 1931, *Mencapai Indonesia Merdeka* pada tahun 1933 (Adams, 1966: 28). Dasar dari pandangan marhaenis yang dibentuk dan diciptakan oleh Ir. Soekarno pada diri PNI lama (1927-1931) lalu diterapkan menjadi dasar resmi bagi PNI dalam manifes PNI pada kongres ke-6 di Surabaya pada Desember 1952.

Bagi Soekarno marhaen adalah semua masyarakat dari kalangan yang dimarjinalkan ekonomi, baik memiliki alat produksi atau tidak. Kemiskinan kaum marhaen diakibatkan oleh operasi ideologi yang mengeksploitasi sumber daya ekonomi dengan masyarakat sebagai sumber tenaga kerja murah dan dilakukan dengan paksaan serta kerelaan supaya mau dikuasi (Kaligis, 2014: 59). Marhaenisme merupakan inti dari ajaran Soekarno, pemikiran tentang marhaenisme merupakan originalitas pemikiran politiknya, marhaenisme diambil dari nama seorang petani di Jawa Barat. Perjumpaan dengan *kang* marhaen dikisahkan oleh Soekarno bertemu dengan seorang petani miskin, kemudian dalam pertemuan itu terjadilah dialog diantara keduanya, Soekarno bertanya tentang kepemilikan tanah, bajak, kerbau, dan cangkul, marhaen menjawab bahwa alat-alat produksi tersebut memiliki oleh dirinya sendiri.

Soekarno membuat pemikiran tentang marhaenisme sebagai upaya dalam memperjuangkan untuk melawan kapitalisme dan imperialisme, setelah ia menyadari bahwa teori-teori Marxisme dari barat tidak sesuai dengan negara jajahan seperti Indonesia, yang perkonomian belum mencapai tahap kapitalis (Susilo, 2008: 85-87).

Menurut pidato Soekarno (1965: 2) yang dijelaskan pada 24 Maret 1965 dikatakan bahwa:

Perkataan marhaen itu asalnja dari perkataan Sunda, Djawab Barat: mar-ha-en, marhaen. Asal mulanja perkataan Marhaen, jaitu, pada suatu hari saja berdjumpa dengan seorang petani miskin, saja tanja kepadanja: tanah ini siapa pemiliknja? Dia jang miliki, katanja. Patjul ini siapa jang miliki? Dia. Segala sesuatu alat-alat ini siapa jang miliki? Dia. Lantas saja bertanja kepadanja: namamu siapa? Marhaen. Lantas saja berikan nama dia itu kepada teori jang saja sedang susun dan djalankan, jaitu marhaenisme, bukan Marhein; Mar-ha-en, jang djelas, Marhaen. Apalagi kalau setjara Sunda: Abdi mah Mer-ha-en, Marhaen.

Istilah *wong cilik* berasal dari Jawa yang asal-usulnya berawal dari *aristocratic realions*. Clifford Geertz saat melakukan penelitian sejarah sosial di Jawa Timur tepatnya Kota Mojokuto dari saat abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Geertz menemukan istilah itu digunakan untuk menunjukkan rakyat kecil di sana. Rakyat Mojokuto mengalami beberapa peristiwa yang berimbas pada istilah *wong cilik* ini seperti Perang Jawa (1830), sistem Tanam Paksa (1830-1870), pembangunan industri pertanian dan perkebunan oleh kolonial, hingga kegagalan negara baru (Indonesia) dalam menangani masalah-masalah politik, ekonomi, dan sosial yang berdampak pada kota ini. Mereka terdiri dari kaum petani melarat, para pedagang kecil dan buruh perusahaan tebu (Geertz, 1989: 1-6). Sehingga dengan adanya pengelompokan menurut *aristocratic relations*, maka marjinalisasi ekonomi diakibatkan oleh adanya kolonialisme dan kapitalisme.

Geertz (2017: 158) menjelaskan mengenai rakyat marhaen dalam penelitiannya di Mojokuto:

Jadi, “rakyat marhaen” adalah mereka yang sekalipun ditindas, diperas, dan dibenci masih percaya pada kekuatan mereka sendiri, yang diorganisasikan untuk menentang serta mengusir. Kekuatan ini malahan untuk menghancurkan kapitalisme dan imperialism, serta menghancurkan semua penindasan dan pengisapan yang sewenang-wenang.

Penggunaan istilah *wong cilik* berbeda dengan penggunaan kata marhaen. *Wong cilik* akan berlanjut digunakan PDI Perjuangan untuk mentransformasikan istilah marhaen untuk identitas bagi semua rakyat kecil

yang dianggap cocok sesuai dengan perkembangan politik masa Orde Baru. Karena istilah Marhaen tidak dapat digunakan pada masa itu karena dianggap identik dengan PNI serta dapat dikaitkan dengan masa Orde Lama mengingat bahwa masa Orde Baru ini sedang gencarnya de-Soekarnoisasi (Kaligis, 2014: 61).

Soekarno memaparkan Marhaenisme tidak pernah keluar dari benang merah yang telah digariskan sejak tahun 1927 tentang Marhaenisme, diantaranya Marhaen merupakan kaum melarat Indonesia, yang terdiri dari buruh tani, buruh, pegawai kecil, pengusaha kecil, kusir, tukang, dan kaum kecil lainnya. Soekarno menyebutkan Marhaen adalah rakyat Indonesia yang dimiskinkan oleh imperialisme. Marhaen Indonesia berdomisili di gunung, di pantai, di dataran rendah, di desa, di kota, dan di mana saja. Marhaen itu ada yang beragama Islam, Kristen, Budha, Hindu, dan ada juga yang menganut animisme. Terhapusnya kemiskinan dan terwujudnya masyarakat adil dan makmur, hanya bisa dicapai dengan kemerdekaan nasional, dimana kemerdekaan itu adalah jembatan emas. (Kuswono, 2016: 125).

Soekarno menyimpulkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai petani “termiskinkan” secara sistematis, bukan karena relasi antara kaum proletar dengan kaum kapitalis yang umumnya terjadi di negara-negara barat atau antara borjuis dengan kelas proletar dengan kelas yang tidak mempunyai alat produksi dan hanya memiliki tenaganya saja untuk dijual (Soekarno, Tentang Marhaen dan Proletar, 1999).

### **1. Konsep Marhaenisme**

Marhaen mulai mencuat ke permukaan ketika Soekarno melakukan pembelaan *raad van indie* di Bandung pada 1930. Marhaen berasal dari nama petani di daerah Jawa Barat yang ditemui oleh Soekarno. Ungkapan *kromo* yang memiliki arti orang kecil masih digunakan hingga akhir 1930. Ketika propaganda PKI dilancarkan, istilah *kromo* berubah dan mengacu pada kaum proletar, hal ini membuat Soekarno mencari istilah baru (Kuswono, 2016: 124). Istilah yang mampu menunjukkan eksistensi rakyat kecil sama halnya marxisme yang memperjuangkan hak kaum proletar.

Konsep dari marhaenisme muncul ketika usia Soekarno 20 tahun, menurut ciritanya ia mendapat wahyu di sebuah desa di Bandung Selatan sewaktu bertemu dan berbicara dengan seorang petani yang berpakaian lusuh dan sedang mencangkul tanah. Kemungkinan percakapan yang terjadi telah menyadarkan Soekarno untuk mampu menghasilkan suatu rumusan mengenai konsep marhaenisme yang bercirikan Indonesia. Marhaenisme berakar dari kata Marhaen yang merupakan nama petani yang diajak bercakap-cakap Soekarno (Soenario, 1988: 38).

Sesuai dengan penegasan Ketua Umum PNI Bapak Ali Sastroamidjojo (Pidato mengenai Pendidikan Kader Pelopor Marhaenisme 23-26 Maret 1965) di depan rapat umum “Dwi-Kora” pada pembukaan sidang BPK di Bandung antara lain:

Bagi PNI/Front Marhaenisme jang azaz dan perdjooangannja adalah Marhaenisme adjaran Bung Karno, tidak mungkin ada lain2 adjaran2 politik Bung Karno diluar Marhaenisme itu. Dan seperti berkali-kali ditegaskan oleh Bung Karno sendiri bahwa Marhaenisme adalah Marxisme jang diterapkan di Indonesia dengan sedjarah perkembangan masjarakatnja sendiri serta situasi dan kondisinja sendiri, maka PNI/Front Marhaenisme akan menentang penjebaran adjaran2 politik Bung Karno jang mengingkari arti pokoknja, jaitu Marhaenisme sebagai Marxisme jang ditrapkan dalam situasi dan kondisi di Indonesia.

Marhaen merupakan istilah yang dipakai untuk warga negara Indonesia yang miskin dan tertindas serta menderita karena ulah penjajahan, sedangkan istilah mengenai proletariat adalah penggolongan rakyat menurut ajaran Engels dan Marx (Harry & Suparlan, 1982: 201). Kaum marhaen adalah orang yang memiliki alat produksi, namun lain halnya dengan kaum proletar yang tidak memiliki alat produksi dan hanya menjual jasa.

Istilah “marhaenisme sebagai marxisme yang digunakan di Indonesia” itu kemudian menjadi perdebatan keras di internal PNI pada tataran politis-praktis dan ideologis. Ketidaktepahaman mengenai marhaenisme membuat Kongres PNI di Solo tahun 1960 memutuskan pembentukan panitia doktrin. Panitia doktrin ini berusaha meujudkan satu doktrin marhaenisme dalam naskah berjudul “Dasar-Dasar Pokok Marhaenisme”. Dalam naskah tersebut diterangkan bahwa filsafat marhaenisme adalah lahir dan batin yang mengakui

kekuatan lahir dan kekuatan batin yang timbal balik dalam prosesnya. Dalam perjuangan dan pandangan hidupnya, marhaenisme menyadarkan kepada kehidupan rohani bangsa dan rakyat Indonesia, yakni bangsa dan rakyat yang ber-Tuhan (Kaligis, 2014: 242).

Konsep yang menjelaskan tentang jiwa marhaenisme tertuang dalam 9 tesis marhaenisme di antaranya, Marhaenisme merupakan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Marhaen didominasi kaum proletar Indonesia, kaum tani-tani Indonesia yang melarat serta kaum melarat Indonesia yang lain-lain. Partindo menggunakan perkataan marhaen, dan tidak proletar, oleh karena perkataan proletar sudah termaktub di dalam perkataan marhaen, dan oleh karena perkataan proletar itu bisa juga diartikan bahwa kaum tani dan lain-lain kaum yang melarat tidak termaktub di dalamnya.

Marhaenisme merupakan adaptasi marxisme yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Marhaenisme dan Marxisme tidak hanya sekedar teori ekonomi maupun teori sejarah namun keduanya merupakan teori perjuangan. Perjuangan untuk melawan belenggu imperialisme dan kolonialisme. Selain persamaan marhaenisme dan marxisme juga memiliki perbedaan. Perbedaan *pertama* ialah konsep perjuangan kelas ala Marxian tidak relevan dengan konteks masyarakat Indonesia saat itu, karena kelas proletar yang menjadi pelopor revolusi sosial dalam teori revolusi komunis belum terbentuk di Hindia Belanda, feodalisme masih kental menyelimuti masyarakat. Kemiskinan yang terjadi bukan murni dari kapitalisme, tapi akibat dari penjajahan ratusan tahun, perjuangan kelas harus digantikan dengan perjuangan kemerdekaan.

*Kedua*, dalam marhaenisme Soekarno menyingkirkan peran monopoli kelas proletar untuk digantikan oleh kaum marhaen. Marhaen adalah kaum miskin Indonesia, yang berbeda dengan proletar, marhaen masih memiliki alat-alat produksi, walau sekala kecil. Menurut Soekarno, marhaenisme menolak setiap tindak borjuis yang merupakan sumber dari kepincangan yang ada dalam masyarakat. Soekarno berpandangan bahwa orang tidak seharusnya berpandangan rendah terhadap rakyat, bagi Soekarno

rakyat merupakan kelompok yang sekarang lemah dan tertampas hak-haknya, tetapi nantinya ketika digerakan dalam gelora revolusi, akan mampu mengubah dunia, marhaenisme menunjukkan bahwa Soekarno memiliki pandangan jauh kedepan yang merupakan antitesis dari praktek-praktek imperialisme yang serakah menguras kekayaan alam Indonesia (Gili & Dini, 2017: 24).

Marhaenisme sendiri sudah dapat dikatakan sebagai ideologi karena sudah memenuhi kaidah-kaidah ideologi. Marhaenisme merupakan buah pikiran yang dirumuskan oleh Soekarno dan kemudian diyakini oleh sebaigian atau sekelompok masyarakat Indonesia. Dalam Pancasila dasar negara Indonesia, ideologi marhaenisme ini dapat dikatakan bahwa menjadi intisari di dalamnya. Dimana dalam kelima sila tersebut jika diperas kembali akan menjadi tiga poin dasar negara yakni Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi dan juga Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika diperhatikan lagi ketiga poin tersebut merupakan rumusan dari Gotong Royong, konsep yang dimiliki oleh ideologi marhaenisme.

## **2. Prinsip Marhaenisme**

Menurut keputusan Partindo, prinsip-prinsip marhaenisme diantaranya sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang beranggotakan petani dan kaum melarat lainnya (Sukarno, 1964:253). tujuan dari ideologi ini ialah mengubah keadaan seluruh masyarakat ke arah yang lebih baik. Sosio-nasionalisme seperti ini dicanangkan oleh presiden pertama RI adalah nasionalisme marhaen dan cocok digunakan sebagai media perjuangan rakyat bawah atau rakyat kecil (Ranoh, 1999: 45).

Prinsip marhaenisme menurut Racamora (1991: 99) dibedakan menjadi dua macam, diantaranya:

### **a. Sosio-Demokrasi**

Sosio-Demokrasi adalah demokrasi politik, ekonomi, dan sosial. Demokrasi politik mengakui hak yang sama bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam perumusan struktur dan tujuan negara. Demokrasi ekonomi mengakui hak setiap orang untuk hidup sejahtera bersama yang

lain. Demokrasi sosial mengakui hak setiap individu terhadap penilaian sosial yang sama, dan mengakui hak setiap orang untuk berjuang bagi pencapaian pribadi setinggi-tingginya dalam bidang apapun menurut kemampuannya sendiri (Racamora, 1991: 99).

Sosio-demokrasi muncul sebagai reaksi dari adanya demokrasi Barat. Menurut Soekarno demokrasi Barat dianggap lebih bersifat liberalis. Sementara pergerakan rakyat Marhaen lebih disebabkan oleh kemelaratan yang mencita-citakan kehidupan yang lebih baik dan sempurna. Tantangan yang begitu besar bagi kaum Marhaen untuk melakukan sebuah pergerakan massa yang ingin mengubah sifat masyarakat sampai kepada akar-akarnya. Perubahan itu harus didukung oleh kemauan yang besar dari masyarakat sendiri dengan melakukan massa aksi (Ign. Gatut Saksono, 2008: 54-56).

#### **b. Sosio-Nasionalisme**

Sosio-Nasionalisme adalah nasionalisme yang didasarkan pada sosialisme. Nasionalisme adalah rasa kebangsaan yang berasal dari nasib bersama dan kepentingan bersama. Sosio-nasionalisme mengakui bahwa, bangsa-bangsa adalah bagian yang lebih besar dari seluruh umat manusia dan bahwa bangsa-bangsa harus saling bekerja sama meskipun ada perbedaan diantara mereka. Namun ini berarti hubungan dengan internasionalisme harus sama sekali bebas dari kolonialisme dan eksploitasi satu bangsa oleh bangsa lain, secara ekonomi maupun budaya (Racamora, 1991: 99). Kaum Marhaen harus terlepas dari gencatan kapitalisme dan mengobarkan semangat perlawanan kaum buruh dan mengorganisasikannya kedalam badan-badan serikat sekerja yang kuat (Ign. Gatut Saksono, 2008: 51).

### **3. Tujuan dan Fungsi Marhaenisme**

Marhaenisme adalah paham yang bertujuan untuk memperjuangkan nasib kaum rakyat kecil. Dalam pengertian lain marhaenisme juga merupakan ideologi politik yang tumbuh dan berkembang berdasarkan keadaan dan keinginan masyarakat Indonesia berasaskan sosio-nasionalisme, sosio-

demokrasi, gotong royong, kebangsaan, kemerdekaan beragama dan kerakyatan (Anastasia dan Sultani, 2018: 11).

Soekarno (1964: 253) menjelaskan bahwa marhaenisme merupakan ideologi yang berkeinginan menghilangkan penindasan, penganiayaan, pemerasan, penghisapan serta menginginkan adanya masyarakat yang adil dan makmur, melalui kemerdekaan nasional dengan adanya demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Soekarno menegaskan kembali tentang pengertian marhaen, bahwa yang dinamakan marhen menurut Soekarno bukannya kaum buruh saja (*proletar*) melainkan juga tani, kaum nelayan maupun pegawai kantor, insinyur maupun dokter yang melarat, artinya kecil (Soenario, 1988: 38). Maehaenisme merupakan gerakan yang dilakukan oleh kau marhaen dengan perjuangan revolusioner untuk menghancurkan imperialism dan kapitalisme (Sukarno, 1964: 253).

## **B. Pelaksanaan Ideologi Marhaenisme Pemerintahan Presiden Soekarno Tahun 1950-1965**

Pelaksanaan marhaenisme dalam kurun tahun 1950-1965 memiliki beberapa wadah organisasi yang diantaranya Partai Nasional Indonesia, Persatuan Rakyat Marhaenis Indonesia dan Gerakan Wanita Indonesia. Meskipun terdapat banyak organisasi yang menganut marhaenisme, organisasi di atas memiliki peran yang cukup terlihat bagi sejarah bangsa Indonesia khususnya perspektif rakyat kecil.

### **1. Partai Nasional Indonesia**

Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) lahir pada 4 Juli 1927 (Kaligis, 2014: 91). Pendiri perserikatan ini ialah Ir. Soekarno, Dr. Tjiptomangunkusumo, Ir. Anwari, Mr. Sartono, Mr. Iskak, Mr. Sunario, Mr. Budiarto dan Dr. Samsi. Lima orang yang disebut terakhir merupakan mahasiswa yang aktif dalam Perhimpunan Indonesia di Belanda (Soenario, 1988: 9-10). Seluruh pendiri PNI memiliki pandangan Indonesia merdeka. Kongres pertama PNI diadakan di Surabaya pada 27-31 Mei 1928

menghasilkan perubahan nama PNI yang tadinya Perserikatan Nasional Indonesia menjadi Partai Nasional Indonesia.

PNI mengalami kemunduran pada 1928 karena dianggap melakukan gerakan yang radikal terhadap pemerintah kolonial. Beberapa tokoh PNI seperti Soekarno, Maskun, Supriadinata dan Gatot Mangkupraja ditangkap oleh pemerintah kolonial pada 29 Desember 1929. Setelah Soekarno keluar dari tahanan, terdapat kenyataan bahwa 10.000 anggota PNI telah keluar dari organisasi tersebut. Kaligis (2014: 104) menyebutkan bahwa beberapa aktivis PNI yang idealis berusaha melanjutkan program PNI dengan membentuk Partai Indonesia (Partindo) pada April 1931. Partindo menggunakan ideologi marhaenisme dengan Soekarno sebagai penggerak pada 1933. Namun pergerakan perjuangan rakyat terhenti akibat ruang perpolitikan diperkecil oleh pemerintah kolonial (Kaligis, 2014: 108-109).

Penafsiran marhaenisme sebagai ideologi disesuaikan dengan kebutuhan partai dengan tuntutan sejarah yang saling bertentangan, susunan partai dan koalisi politik (Kasenda, 2017: 43). PNI menjadi suatu partai yang memunculkan kembali keberadaan ideologi marhaenisme yang bertujuan membela rakyat miskin Indonesia. Suatu pemerintahan Indonesia yang menggunakan ideologi marhaenisme menjadi dasar mencari simpati rakyat. Simpati rakyat ini dapat tercapai sehingga Indonesia tetap mampu mempertahankan kemerdekaan meski Belanda melaksanakan agresi militer pada 1946 dan 1948.

Perumusan kembali ideologi PNI, disebut juga sebagai “manifesto marhaenis”, terjadi di Kongres PNI keenam pada Desember 1952. Manifesto ini menyatakan kondisi masyarakat Indonesia pascakolonial yaitu 2% yang hidup makmur, 7% yang hidup berkecukupan, dan 91% sisanya merupakan petani miskin, pedagang, buruh, tukang, dan rakyat kecil lainnya yang miskin. Untuk mencapai tujuan membebaskan rakyat marhaen maka partai marhaenis bertugas menghancurkan pranata feodal, benih-benih kapitalisme nasional, perusahaan raksasa asing, dan kebodohan rakyat yang masih ada di Indonesia (Sjamsuddin, 1984: ).

PNI memiliki titah untuk memperjuangkan serta membuat seluruh masyarakat Indonesia khususnya kaum marhaen hidup berkecukupan. Secara garis besar, PNI dibagi kedalam 2 fase. Pada fase pertama PNI menggunakan asas kemerdekaan, persatuan Indonesia, solidaritas antar pribumi, non-koperasi dan *self help* pada 1927 hingga 1931. Pada fase kedua, antara tahun 1946 hingga 1964, PNI menggunakan asas sosio nasionalis dan sosio demokratis. Perbedaan kedua fase terletak pada kondisi nasional. Pra kemerdekaan membuat tokoh-tokoh PNI mencanangkan Indoneisa merdeka. Sementara pasca kemerdekaan merupakan proses pembentukan pemerintahan bagi republik Indonesia. PNI hadir untuk memeriahkan jalannya pemerintahan kala itu. Ali Sastromidjojo (dalam arsip 4 juli 1965) menambahkan fase ketiga yang dinamai periode Deklarasi Marhaenis. Fase tersebut dimulai tahun 1965.

## **2. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia**

Permai adalah salah satu organisasi lain yang memiliki landasan pemikiran marhenisme. Pengikut dan organisasi Permai kebanyakan adalah masyarakat Indonesia kelas menengah ke bawah. Permai merupakan akronim dari persatuan rakyat marhaen Indonesia yang terjemahan kasarnya berarti organisasi rakyat jelata Indonesia. Geertz (2017: 158) mengungkapkan bahwa di panggung nasional, Permai merupakan partai politik yang memiliki wakil di parlemen.

Secara politik, Permai berkoalisi dengan PNI karena memiliki pandangan yang sama. Perbedaan antara Permai dan PNI ialah jumlah massa PNI lebih besar. Selain koalisi, agenda-agenda Permai lebih banyak menjamah kaum-kaum jelata di pedesaan. Permai mampu mewedahi masyarakat desa khususnya di Jawa yang masih kental dengan aliran-aliran kepercayaan nenek moyang. Mulder (2005: 21-22) menambahkan bahwa permai merupakan gerakan sosial sebagai partai politik yang berasosiasi mistisme kaum abangan. Pandangan mistisme Permai mengambil peran yang cukup sentral karena terdapat ritual-ritual di setiap penyelenggaraan agenda Permai. Karena masih memegang teguh tradisi kuno hindu, beberapa anggota Permai menganggap

agama islam sebagai agama asing yang bertentangan dengan budaya Jawa. Banyak konservatif Permai memusuhi agama islam.

Sebagian besar kaum abangan, Permai bermata pencaharian sebagai petani melarat. Kaligis (2014: 60) menambahkan pekerjaan anggota Permai terdiri dari kaum petani yang memiliki sepetak tanah, buruh pabrik tebu, pedagang kecil, serta kaum miskin lainnya. Propaganda-propaganda yang dilancarkan Permai, mampu diterima oleh kebanyakan masyarakat kaum bawah.

### **SIMPULAN**

Ideologi marhaenisme yang dikemukakan oleh Soekarno memiliki berbagai nilai dan makna. Marhaenisme merupakan istilah yang berasal dari Marhaen, seorang petani yang ditemuinya di Bandung. Setelah mengetahui kondisi sang petani, Soekarno beranggapan bahwa seorang petani miskin dan melarat juga merupakan rakyat jelata Indonesia. Konsep marhaenisme ini secara garis besar ialah asaz dan perjuangan menyelamatkan kehidupan kaum marhaen yang tertindas. Marhaenisme memiliki tujuan untuk menghilangkan imperialisme dan kolonialisme. Kemudian marhaenisme ini memiliki dua prinsip yaitu sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.

Ideologi marhaenisme juga digunakan oleh beberapa partai politik dalam rangka meramaikan panggung perpolitikan Indonesia. Indonesia yang kala itu baru merdeka dan lepas dari cengkraman Belanda perlu membangun perpolitikan nasional. Untuk mewedahi aspirasi masyarakat Indonesia yang heterogen, maka beberapa partai politik memiliki pandangan yang berbeda-beda. Partai politik yang menganut konsep ideologi marhaenisme ialah PNI dan Permai. Sementara organisasi kemasyarakatan yang mengimplementasikan marhaenisme ialah gerwani.